

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Sewa dan Klasifikasi Sewa

2.1.1 Definisi Sewa

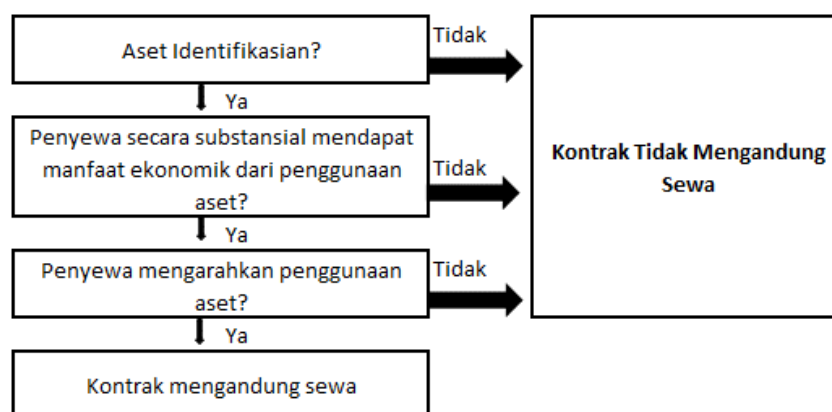
Definisi sewa berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) adalah perjanjian kontraktual antara pesewa (*lessor*) dan penyewa (*lessee*), yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset tertentu yang dimiliki oleh pesewa dalam jangka waktu tertentu. Sewa merupakan metode yang memberikan akses aset milik pesewa untuk digunakan oleh penyewa untuk mengurangi risiko atas kepemilikan aset dan untuk mendorong penjualan aset terkait. Menurut (Donald E. Kieso, 2020) menyatakan bahwa sewa merupakan persetujuan kontraktual antara *lessor* (pesewa) dengan *lessee* (penyewa) yang memberikan *lessee* hak guna (*right of use*) aset milik *lessor* untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya penyewa akan melakukan pembayaran sewa terkait selama periode sewa kepada *lessor* (Donald E. Kieso, 2020)

Peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan transaksi sewa di Indonesia yaitu diatur dalam PSAK 30 sebelum digantikan oleh peraturan terbaru yaitu PSAK 73 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi tunggal untuk pesewa dalam hal pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa. PSAK 73 mengadopsi standar internasional yang lebih dahulu terbit yaitu IFRS 17. PSAK 73 ini juga menggantikan peraturan yang berlaku sebelumnya antara lain PSAK 30 (terkait sewa), ISAK 8, ISAK 23, ISAK 24, ISAK 25, PSAK 69, ISAK 16, PSAK 72, dan PSAK 19.

Pada awal terjadinya kontrak, Penyewa akan mengidentifikasi apakah suatu kontrak mengandung sewa. Kontrak mengandung sewa jika terdapat pengalihan hak dalam mengendalikan dan menggunakan aset identifikasian selama suatu jangka waktu tertentu yang dipertukarkan dengan imbalan terkait pemberian hak tersebut. Kontrak mengandung sewa jika kontrak tersebut dapat menjawab semua pertanyaan tentang identifikasian sewa yang disajikan dalam Gambar II.1 berikut.

Gambar II.1 Identifikasi Sewa



Sumber: Diolah dari Bahan Ajar AKM II Luthfi Mahrus

2.1.2 Klasifikasi Sewa

Pada PSAK 73 transaksi sewa diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan yang berlaku bagi penyewa maupun pesewa. Sewa

akan diklasifikasikan ke dalam sewa pembiayaan apabila sewa mengalihkan seluruh risiko dan manfaat secara substansial yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Pengklasifikasian sewa terkait sewa pembiayaan atau sewa operasi berdasarkan PSAK 73 lebih menekankan pada substansi transaksi daripada kontraknya yang sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu “*substance over form*”.

Pada PSAK 73 paragraf 63, transaksi yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan berdasarkan situasi individual maupun gabungan pada umumnya adalah:

- a. sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa;
- b. penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar pada harga yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi tersebut dimulai, sehingga menjadi cukup pasti, pada tanggal insepasi, bahwa opsi tersebut akan dieksekusi;
- c. masa sewa adalah sebagian umur ekonomik dari aset pendasar meski kepemilikan aset tidak dialihkan;
- d. pada tanggal insepasi, nilai kini dari pembayaran sewa setidaknya mencakup secara substansial seluruh nilai wajar aset pendasar;
- e. aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi signifikan.

Selanjutnya pada PSAK 73 paragraf 64 dijelaskan lebih lanjut bahwa situasi yang mengakibatkan pengklasifikasian menjadi sewa pembiayaan di antaranya jika penyewa dapat membatalkan sewa maka kerugian ditanggung oleh

penyewa, keuntungan atau kerugian nilai wajar residual yang berfluktuatif terutang kepada penyewa, dan penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa yang kedua kalinya pada harga rental yang secara substansial lebih rendah daripada rental pasar. Penjelasan terhadap klasifikasi sewa pembiayaan tidak selalu konklusif dan apabila terdapat situasi yang tidak mengalihkan risiko dan manfaat secara substansial maka sewa tersebut digolongkan sebagai sewa operasi.

Menurut Mahrus dan Biswan (2021), Pengklasifikasian sewa untuk mengkategorikan sewa termasuk dalam sewa pembiayaan atau sewa operasi dari sisi pesewa yaitu sewa harus bersifat *noncancelable* (tidak dapat dibatalkan) pada sewa pembiayaan. Asesmen lanjutan setelah sewa bersifat *noncancelable* adalah menjawab salah satu dari lima klausul sewa yang tersaji dalam gambar II.2 berikut.

Gambar II.2 Lima Uji Klausul Sewa



Sumber: Mahrus, Moh. Luthfi & Ali Tafriji Biswan Praktik Akuntansi

Keuangan Menengah tahun 2021

Pada gambar II.2 dijelaskan bahwa terkait dengan pengklasifikasikan transaksi sewa menggunakan klausul sewa. Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan setidaknya menjawab satu sebagai “ya”, apabila tidak terdapat minimal satu jawaban “ya” maka transaksi dikategorikan sebagai sewa operasi

Bagi penyewa, semua klasifikasi sewa termasuk sewa pembiayaan tetapi terdapat pengecualian agar sewa dapat diklasifikasikan sebagai sewa operasi. IASB menekankan bahwa penyewa mengkapitalisasikan semua sewa, kecuali periode kurang dari satu tahun (*short-term lease*) dan aset bernilai rendah kurang dari \$5.000 (*low-value lease*). Konsekuensi yang timbul akibat transaksi sewa bagi penyewa yaitu timbulnya aset dan kewajiban untuk membayar sewa. Terkait dengan hal tersebut penyewa mengakui beban bunga atas utang sewa dan mencatat depresiasi aset hak guna (*right-of-use assets*). Pembayaran sewa bagi penyewa mencakup pembayaran tetap, pembayaran atas indeks atau tarif, nilai sisa digaransi, dan pembayaran terkait opsi pembelian.

2.2 Pengakuan dan Pengukuran Sewa

Pengakuan dan pengukuran sewa untuk pesewa terbagi menjadi dua yaitu pengakuan dan pengukuran untuk sewa pembiayaan dan sewa operasi. Untuk penyewa, pengakuan dan pengukuran hanya terkait dengan sewa pembiayaan.

2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Sewa Pembiayaan

Pada awal terjadinya transaksi sewa, pesewa (*lessor*) mengakui aset yang disewakan tersebut dalam laporan keuangan dan disajikan sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa.

2.2.1.1 Pengukuran Awal

Dalam penentuan besaran aset neto sewa pada awal terjadinya transaksi, sesuai dengan PSAK 73 paragraf 68 maka pesewa menggunakan suku bunga implisit (*implicit rate*). Apabila dalam menentukan suku bunga implisit tidak dapat ditentukan, dalam kondisi lain yaitu subsewa maka pesewa-antara dapat menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama pada pengukuran investasi neto sewa.

Biaya langsung pada awal transaksi sewa selain yang ditimbulkan oleh pesewa pabrikan atau diler akan dimasukkan kedalam investasi neto sewa dan menjadi pengurang dari penghasilan yang timbul sepanjang masa sewa. Biaya langsung awal yang dibayarkan oleh penyewa akan menambah aset hak guna (*right-of-use- assets*) tetapi tidak menambah kewajiban sewa (*lease liability*). Apabila biaya langsung awal dibayarkan oleh pesewa maka akan dianggap menjadi beban pada sewa pembiayaan dan sebagai beban yang ditangguhkan serta diamortisasi sepanjang masa sewa pada sewa operasi.

Pada awal terjadinya transaksi, pesewa akan mengakui piutang sewa (*lease receivable*) sebesar nilai kini dari pembayaran sewa setiap periode (*present value annuity*) dan ditambahkan dengan nilai kini dari jaminan *residual value* yang ditunjukkan dalam Tabel II.1.

Tabel II.1 Rumus Piutang Sewa

Lease Receivable	=	Present Value of Rental Payments	+	Present Value of Guaranteed and Unguaranteed Residual Values
-----------------------------	---	---	---	---

Sumber: Diolah Kieso, Weygand, & Warfield (2020)

Selanjutnya pesewa akan membuat jurnal terkait transaksi awal sewa yakni dalam hal pesewa sebagai *sales type lease* maka pesewa akan mengakui penjualan aset dengan mendebit *lease receivable*, dan *cost of good sold* serta mengkredit *sales revenue* dan *inventory* seperti digambarkan dalam Tabel II.2 berikut:

Tabel II.2 Jurnal Awal Pengakuan Sewa Pesewa

Tanggal	Akun	Ref.	Debit	Kredit
	Piutang Sewa		XXX	
	Harga Pokok Penjualan		XXX	
	Persediaan			XXX
	Pendapatan penjualan			XXX

2.2.1.2 Pengukuran Selanjutnya

Penghasilan yang timbul sepanjang masa sewa akan diakui oleh pesewa berdasarkan pola yang merefleksikan besaran tingkat pengembalian periodik yang konstan atas aset neto yang diinvestasikan. Pesewa mengakui pendapatan sepanjang masa sewa yang dihitung secara rasional serta sistematis. Pembayaran sewa yang terkait periode tersebut terhadap investasi bruto sewa untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima oleh pesewa.

Sepanjang masa sewa, pesewa akan mengakui pendapatan berupa pembayaran bunga dan pembayaran dari piutang sewa yang terutang pada awal periode terjadinya sewa. Pembayaran sewa dihitung dari pengurangan dari *fair value* aset oleh nilai residu yang digaransikan/ tidak digaransikan dibagi dengan faktor *annuity due* apabila pembayaran sewa terjadi di awal periode. Jurnal yang dicatat oleh pesewa yaitu mendebit akun Kas dan mengkreditkan akun *lease receivable* serta mengakui pendapatan bunga yaitu *lease receivable* (debit) dan *interest revenue* (kredit) yang di tunjukan pada Tabel II.3.

Tabel II.3 Jurnal Pengakuan Sepanjang Masa Sewa

Tanggal	Akun	Ref.	Debit	Kredit
	Kas		XXX	
	Piutang Sewa			XXX
	Piutang Sewa		XXX	
	Pendapatan Bunga			XXX

2.2.2 Pengakuan dan Pengukuran Sewa Operasi

Penghasilan sewa operasi diakui pesewa dengan dasar perhitungan garis lurus atau dasar sistematik lainnya. Pesewa dapat menerapkan dasar perhitungan atas sewa operasi lainnya apabila perhitungan tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun sepanjang masa sewa.

Pada sewa operasi, pesewa akan mengakui biaya termasuk penyusutan sebagai beban dalam mengakui pendapatan sewa (*matching cost againsts revenue*). Pesewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam mendapatkan sewa operasi pada jumlah tercatat aset pendasar, serta mengakui adanya biaya sebagai beban yang atas dasar yang sama sebagai penghasilan sepanjang masa sewa. Biaya awal langsung dalam sewa operasi akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Jurnal yang dicatat oleh pesewa yaitu mendebit akun kas dan mengkredit *unearned sales revenue* sebesar pembayaran yang dibayarkan penyewa sepanjang periode sewa dan mengakui biaya langsung sebagai *deffered expense*. Ilustrasi jurnal dalam biaya operasi ditunjukkan dalam Tabel II.4.

Tabel II.4 Jurnal Awal Sewa Operasi

Tanggal	Akun	Ref.	Debit	Kredit
	Kas		XXX	
	Pendapatan yang ditangguhkan			XXX
	Beban ditangguhkan		XXX	
	Kas			XXX

2.2.3 Pengakuan dan Pengukuran Sebagai Penyewa

Pengakuan sewa bagi penyewa pada tanggal awal terjadinya sewa, penyewa akan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa.

2.2.3.1 Pengukuran Awal

Pada PSAK 73 pengukuran aset hak guna oleh penyewa yaitu menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan aset hak-guna yang dapat dikapitalisasi meliputi: jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan sebelum tanggal permulaan yang dikurangi dengan insentif sewa yang diterima, biaya langsung awal oleh penyewa, estimasi biaya oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat aset berada atau merestorasi aset pendasar sampai memenuhi persyaratan, dikecualikan biaya tersebut menghasilkan persediaan.

Penyewa mengukur liabilitas sewa sesuai PSAK 73, pada tanggal permulaan penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit yang apabila tidak dapat ditentukan maka penyewa menggunakan bunga pinjaman incremental penyewa. Pembayaran sewa termasuk dalam liabilitas sewa yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa meliputi:

- 1) Pembayaran tetap dikurangi piutang insentif sewa;
- 2) Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang diukur pada tanggal permulaan;

- 3) Jumlah yang diperkirakan akan dibayar oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- 4) Hak eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti mengeksekusi opsi tersebut;
- 5) Pembayaran pinalti akibat penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk penghentian sewa.

Pada awal sewa terjadinya sewa, penyewa akan menjurnal adanya aset hak-guna dan liabilitas sewa. Jika penyewa membayarkan cicilan dimuka maka akan memunculkan akun kas yang mengurangi liabilitas sewa. Jurnal yang dibuat penyewa disajikan dalam Tabel II.5.

Tabel II.5 Jurnal Awal Pengakuan Sewa bagi Penyewa

Tanggal	Akun	Ref.	Debit	Kredit
	Aset hak-guna		XXX	
	Liabilitas sewa			XXX
	Liabilitas sewa		XXX	
	Kas			XXX

2.2.3.2 Pengukuran Selanjutnya

Pada PSAK 73, pengukuran aset hak-guna setelah tanggal permulaan menggunakan model biaya kecuali entitas menerapkan model lain seperti model nilai wajar dan model revaluasi. Pada penerapan model biaya penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan:

- 1) dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai; dan
- 2) disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang ditetapkan sesuai PSAK 73 paragraf 36 (C)

Pada paragraf 36 PSAK 73 penyewa mengukur liabilitas sewa setelah tanggal permulaan. Penyewa mengukur liabilitas sewa dengan:

- 1) Menambah jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa.
- 2) Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa telah dibayar.
- 3) Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap substansi revisian, atau untuk merefleksikan penilaian kembali.

Pengecualian yang dijelaskan PSAK 73 terkait aset hak-guna dan liabilitas sewa yaitu apabila penyewa memilih untuk tidak melakukan persyaratan terkait pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa. Termasuk dalam pengecualian yaitu sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah.

Pada pengukuran selanjutnya penyewa akan memunculkan akun beban bunga atas liabilitas sewa dan memunculkan beban depresiasi atas aset hak-guna. Jurnal yang dicatat penyewa disajikan dalam Tabel II.6.

Tabel II.6 Jurnal Selanjutnya Sewa bagi Penyewa

Tanggal	Akun	Ref.	Debit	Kredit
	Beban bunga		XXX	
	Liabilitas sewa			XXX
	Beban penyusutan		XXX	
	Aset hak-guna			XXX

2.3 Pengungkapan Sewa

Pesewa dan penyewa memiliki kewajiban dalam mengungkapkan hal-hal terkait sewa dalam catatan atas laporan keuangan atau bagian lain dari laporan keuangan yang terpisah. PSAK 73 menjelaskan tujuan dari pengungkapan yaitu supaya pesewa dan penyewa mengungkapkan informasi terkait sewa dalam catatan atas laporan keuangan serta informasi pada laporan keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang menjadi dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk

menilai dampak dari sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas.

Dalam periode pelaporannya, PSAK 73 mensyaratkan pesewa untuk mengungkapkan terkait jumlah tertentu. Untuk sewa pembiayaan pesewa harus mengungkapkan jumlah terkait laba atau rugi dari penjualan, penghasilan keuangan atas investasi neto sewa, dan penghasilan terkait pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa. Untuk sewa operasi pesewa harus mengungkapkan jumlah dari penghasilan sewa yang secara terpisah mengungkapkan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada suatu indeks atau suku bunga. Pesewa juga disyaratkan menampilkan hal di atas dalam bentuk tabel kecuali terdapat format lain yang lebih tepat.

Dalam periode pelaporannya, PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengungkapkan terkait jumlah tertentu sebagai berikut:

- 1) Beban depresiasi aset hak-guna berdasar aset pendasar sewa.
- 2) Beban bunga yang timbul akibat liabilitas sewa
- 3) Beban terkait sewa jangka-pendek yang tidak termasuk beban terkait sewa dengan periode sewa satu bulan atau kurang.
- 4) Beban terkait sewa aset bernilai-rendah tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek atas aset bernilai-rendah.
- 5) Beban terkait pembayaran sewa variabel tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa.
- 6) Pendapatan dari aktivitas subsewa aset hak-guna.

- 7) Pengeluaran total kas atas sewa.
- 8) Penambahan terkait aset hak-guna.
- 9) Keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dari transaksi jual dan sewa balik.
- 10) Jumlah aset hak-guna yang tercatat pada akhir periode pelaporan berdasar kategori kelas aset pendasar.

Tambahan terkait pengungkapan yang dipersyaratkan, penyewa mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tambahan terkait aktivitas sewanya untuk memenuhi tujuan pengungkapan. Informasi tambahan ini dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai sifat aktivitas penyewa, pengeluaran kas masa depan yang berpotensi memberikan dampak bagi penyewa yang tidak terefleksikan dalam pengukuran liabilitas sewa, pembatasan atau perjanjian yang timbul dari sewa, dan transaksi jual dan sewa-balik.

2.4 Rasio Kinerja Keuangan

Terdapat banyak alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan yang tertuang dalam laporan keuangan. Salah satu yang dapat digunakan yaitu analisis rasio keuangan. Rasio keuangan menunjukkan perhitungan dari beberapa variabel dalam laporan keuangan dan dikonversi menjadi nilai-nilai tertentu yang memiliki interpretasi tersendiri sesuai dengan komponen yang digunakan dalam perhitungan rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yang penulis gunakan yaitu rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas.

2.4.1 Rasio Profitabilitas

Tintman *et al.* (2018) berpendapat bahwa rasio profitabilitas mengukur tingkat pengembalian perusahaan atas investasinya dan tingkat keefisienan dalam mengelola bebannya. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengontrol biaya dalam menjalankan bisnisnya dan seberapa efektif manajemen dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Dengan adanya PSAK 73, komposisi atas aset dan liabilitas secara keseluruhan akan berubah karena terdapat klasifikasi aset hak guna dan liabilitas sewa sebagai penyewa. Akan tetapi, dari sisi pendapatan sewa sebagai pesewa tidak berubah secara signifikan.

2.4.1.1 Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin laba bersih merupakan persentase pendapatan bersih setelah pajak (*net income*) dengan penjualan atau pendapatan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Semakin besar rasio marjin laba bersih menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam memperoleh pendapatan dan mengelola bebannya.

$$\text{Marjin Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

2.4.1.2 Rasio Pengembalian Aset (*Return on Assets Ratio*)

Rasio pengembalian aset mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset secara efisien dalam memperoleh laba. Semakin besar rasio pengembalian aset, semakin efisien perusahaan dalam mengelola aset dalam memperoleh laba bersih.

$$\text{Rasio Pengembalian Aset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2.4.1.3 Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity*)

Rasio pengembalian ekuitas mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh dari investasi yang dimiliki para pemegang saham. Semakin besar rasio pengembalian ekuitas, semakin tinggi pengembalian yang diperoleh pemegang saham.

$$\text{Rasio Pengembalian Ekuitas} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.4.2 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau rasio modal merupakan struktur modal yang merujuk pada cara perusahaan dalam membiayai asetnya menggunakan kombinasi antara liabilitas dan ekuitas (Tintman *et al.*, 2018). Adanya PSAK 73 tentunya akan mengubah komposisi aset pada laporan posisi keuangan perusahaan yang mengakibatkan perubahan rasio solvabilitas.

2.4.2.1 Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Assets Ratio*)

Rasio utang terhadap aset bertujuan untuk mengukur seberapa besar persentase utang yang digunakan untuk membiayai aset. Semakin kecil rasio ini, semakin sedikit aset yang dibiayai dengan utang.

$$\text{Rasio Utang terhadap Aset} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

2.4.2.2 Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara utang dengan modal. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi kewajiban dibandingkan modal yang digunakan dalam membiayai aset perusahaan.

$$\text{Rasio Utang terhadap Modal} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.4.3 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan seberapa besar tingkat likuid perusahaan. Perusahaan dikatakan likuid apabila dapat membayar tagihan perusahaan tepat waktu (Tintman *et al.*, 2018). Menurut Subramanyam (2014), Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam memperoleh uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

2.4.3.1 Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Hal tersebut menunjukkan seberapa banyak aset lancar yang dapat menutupi kewajiban lancar perusahaan. Semakin tinggi rasio lancar, semakin tinggi likuiditas perusahaan.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$